

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “Implikasi Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015” merupakan hasil penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, Bagaimanakah Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 terhadap Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah. Kedua, Bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Apakah Upaya Komisi Pemilihan Umum Jika Pasangan Calon Kepala Daerah Tidak Memenuhi Syarat Batas Pemilihan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 telah memerintahkan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagaimana umumnya dalam proses pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di negara ini. Hal ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 terhadap legalitas pasangan calon tunggal dimana putusan mahkamah tersebut berdampak pada mekanisme pemilihan kepala daerah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan terhadap peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dengan plebisit yang meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut.

Kata Kunci : Putusan MK, Pilkada, Pasangan Calon tunggal